

BAB IV

DAMPAK DEMOKRATISASI SISTEM PEMERINTAHAN TERHADAP STABILITAS EKONOMI NEPAL

A. Faktor Gagalnya Demokrasi dalam Membantu Pertumbuhan Ekonomi Nepal

Mengacu pada kerangka teori yang digunakan pada penelitian ini, yaitu konsep hubungan demokrasi dan pertumbuhan ekonomi negara oleh Robert Barro, penyebab utama pertumbuhan ekonomi yang lambat dan pembangunan dalam demokrasi adalah adanya proses pengambilan keputusan yang memakan waktu lama serta memakan biaya yang besar dalam prosesnya. Banyaknya partai politik justru mempersulit persatuan visi dan misi politik ekonomi yang akan dijalankan dalam satu periode pemerintahan.

1. Ketidakstabilan Sistem Pemerintahan Nepal

Nepal telah mengalami periode panjang ketidakstabilan politik yang menghambat kemajuan perekonomiannya, seperti perang sipil antara pemerintah dan pemberontak pemberontak Maois dari 1994 hingga 2006. Perang akhirnya berakhir pada November 2006, ketika Perdana Menteri Koirala dan pemimpin Maoist Prachanda menandatangani kesepakatan damai, dengan korban sekitar 13.000. Pada tahun 2008, pertumbuhan ekonomi juga terganggu oleh protes oleh ras perbatasan India dan Nepal yang tidak puas akan kebijakan yang berlaku di bawah sistem pemerintahan yang demokratis.

Demokratisasi sebagai pilihan sistem pemerintahan yang didambakan mayoritas masyarakat demi kebebasan hak terbukti tidak dapat menjamin adanya pertumbuhan ekonomi dalam sebuah negara seperti apa yang terjadi di Nepal. Pergantian sistem pemerintahan tidak selalu

menjamin adanya dampak positif dalam pembangunan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Angka kemiskinan di Nepal juga ikut meningkat pada masa transisi demokrasinya. Nepal adalah negara termiskin ke-empat di Asia, dengan PDB per kapita hanya \$ 2.573 dihitung pada September tahun 2018 dan setiap tahunnya Nepal masuk di 10 besar negara miskin di dunia sejak tahun 1900-an.¹ Hal ini menjelaskan bahwa 25% penduduk hidup di bawah garis kemiskinan di Nepal yang berjumlah NPR (Nepal Rupee) 19.261 per tahun untuk setiap orang menurut Biro Pusat Statistik Nepal. Pendapatannya sekitar \$ 225, yang berarti siapa pun yang berpenghasilan di atas \$ 0,60 per hari berada di atas garis kemiskinan dan dengan demikian tidak masuk kategori "miskin" dalam lingkup Nepal. Angka ini jauh di bawah standar garis kemiskinan oleh *World Bank* yakni sebesar \$ 1,25 sehari.

Empat dari lima penduduk Nepal lainnya masih tinggal di daerah pedesaan bergantung pada sektor pertanian. Ketergantungan mereka akan hasil pertanian sangat tinggi dikarenakan pertanianlah yang sejak dahulu mereka kenal baik dan turun temurun diajarkan pada keturunannya walaupun tanpa adanya peningkatan kualitas dan teknologi masa kini. Pada tahun 2017, pertanian berkontribusi sebesar 27% dari PDB Nepal, sementara kontribusi dalam sektor jasa mencapai 51,5%, namun dengan besarnya angka pemasukan pada sektor jasa tidak didukung dengan jumlah masyarakat yang berkontribusi di dalamnya. Hanya 19% penduduk

¹ Borgen Magazine. 2018. *Facts About Poverty in Nepal: Struggle and Progress*.
<https://www.borgenmagazine.com/facts-about-poverty-in-nepal/> . Diakses pada 1 Desember 2018.

Nepal yang terlibat dan 69% masyarakatnya bersaing di sektor pertanian.

Bertentangan dengan beredarnya asumsi populer mengenai peningkatan ekonomi berkat dorongan sistem demokrasi, kemiskinan warga perkotaan Nepal justru menurun pada tingkat tertinggi di Nepal, yaitu meningkat sebesar 5,46 poin persentase pada tahun 2010 hingga 2011 dibandingkan pada tahun 2003 hingga 2004 pada saat Nepal belum mengadopsi sistem demokrasi. Hal ini mempersulit upaya pemerintah untuk mengurangi kemiskinan karena banyak dari masyarakat yang tinggal di daerah perkotaan terlibat dalam salah satu mata pencaharian terbesar Nepal yakni sektor industri. Walaupun dipercaya pada awalnya bahwa melalui industri inilah satu-satunya cara agar Nepal terbebas dari kemiskinan, pada kenyataan yang ada banyaknya warga yang terlibat pada sektor industri di perkotaan tidak mendapatkan jaminan sosial yang baik oleh pemerintah. Hal ini tentu jauh mendeskripsikan masyarakat yang sejahtera dalam pandangan negara pada umumnya.

2. Minimnya Edukasi Masyarakat Nepal

Demokrasi sebagai sistem yang segala keputusannya dipegang oleh masyarakat mayoritas dan kebijakan yang berlaku adalah kebijakan yang disetujui bersama tentunya menuntut adanya pendidikan dan pengetahuan yang luas oleh masyarakatnya itu sendiri. Hal ini selalu berlaku di mana pun demokrasi berdiri. Tanpa adanya pengetahuan dan pendidikan masyarakat yang memadai, sistem pemerintahan dengan basis demokrasi tidak akan berjalan sesuai dengan tujuan awalnya yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Masyarakat akan dengan mudah disetir oleh suatu keinginan individu atau kelompok tertentu

ketika tingkat pendidikannya masih rendah. Dengan tingkat pendidikan rendah ini tentunya akan membuat sistem demokrasi menjadi sangat tidak efisien untuk diterapkan dalam sebuah negara.

Nepal yang menggunakan dasar sistem monarki selama ratusan tahun telah membentuk pola politik ekonomi yang bersifat komunis yang terbiasa dengan adanya kegiatan ekonomi terpusat pada satu pihak dalam hal ini pemerintah kerajaan. Maka ketika sistem tersebut terkesan dipaksakan untuk berubah dengan adanya protes dan tuntutan masyarakat untuk memperoleh kesejahteraan yang lebih baik melalui demokrasi, masyarakat Nepal sebenarnya tidak siap dan tidak sepenuhnya mengerti akan pola dan sistem demokrasi yang sesungguhnya.

Demokrasi gagal pula dalam menghilangkan sistem kasta serta menyatukan kelompok-kelompok masyarakat yang terbentuk sejak Nepal berdiri. Sistem kasta memiliki hubungan simbiosis dengan kemiskinan di Nepal. Populasi muslim di Nepal termasuk kelompok kasta yang paling miskin di negara ini karena merupakan kelompok pendatang di negara yang sejak awal berbasis kerajaan Hindu ini. Komunitas Musahar adalah kasta masyarakat Hindu yang sangat sulit didekati oleh pemerintah dan memiliki tingkat pendidikan serta tingkat melek huruf yang terendah di Nepal. Untuk mengurangi hal tersebut, pemerintah telah mendirikan sekolah di berbagai tempat yang membutuhkan, tetapi gagal diikuti dengan penyediaan jasa guru berkualitas dan upaya peningkatan pendidikan yang tergolong sangat rendah dibandingkan negara berkembang lainnya.

Kurangnya pendidikan serta tingkat kemiskinan yang tinggi di Nepal bahkan membawa masyarakatnya dalam kondisi yang memprihatinkan. Sebagai contoh dapat dilihat pada fenomena jual organ sebagai jalan keluar kemiskinan seseorang di

Nepal. Tidak hanya organ ginjal yang dijual oleh masyarakat, namun hampir semua organ tubuh yang dianggap bernilai dan potensial akhirnya direlakan untuk dipasarkan.² Melihat contoh kasus tersebut, untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga pendidikan masyarakat Nepal masih sangat rendah, hal ini tentu berbanding terbalik dengan tuntutan demokrasi yang mengharuskan masyarakatnya memiliki pemikiran yang maju yang dapat membuat kehidupan mereka jauh lebih layak dari sebelumnya.

Adanya pengadopsian sistem pemerintahan dan konstitusi yang lebih demokratis pada tahun 2015 tidak mempengaruhi perbaikan kebijakan pengembangan sumber daya manusia dan alam yang ada di Nepal. Pada tahun 2016, pertumbuhan PDB di Nepal hanya berkisar 4%.³ Langkanya bahan bakar dan bahan baku produksi saat itu yang diakibatkan oleh munculnya implikasi negatif pada hubungan bilateral Nepal menyebabkan banyaknya usaha produksi masyarakat terpaksa berhenti. Kerugian ini tentunya akan berdampak ke banyak aspek kehidupan Nepal yang semakin menerangkan bahwa konsep hubungan demokratisasi dan pertumbuhan ekonomi benar-benar seutuhnya dikendalikan oleh pemerintah yang mengambil alih kekuasaan, bukan karena berubahnya sistem pemerintahan dalam sebuah negara. Banyak negara yang tidak menganut sistem demokrasi namun tetap dapat menumbuhkan

2 Tribun News. *Hidup Miskin dan Kelaparan, Warga di Nepal Jual Organ Tubuh*,
<http://www.tribunnews.com/internasional/2012/09/07/hidup-miskin-dan-kelaparan-warga-di-nepal-jual-organ-tubuh>.

3 The World Bank. *Poverty & Equity Data Portal*.
<http://povertydata.worldbank.org/poverty/country/NPL> .
Diakses pada 1 Desember 2018.

perekonomiannya dengan pesat, yakni negara China sebagai contohnya. Satu pemimpin dan satu aturan dapat mendorong perekonomian negara itu maju dan menguasai mayoritas perdagangan di dunia.

B. Dampak Demokratisasi Terhadap Penurunan Stabilitas Ekonomi Nepal Tahun 2016

Setelah adanya demokratisasi konstitusi dan sistem pemerintahan Nepal pada tahun 2015 dan mengakibatkan berbagai implikasi negatif pada hubungan bilateralnya dengan negara lain, berbagai penurunan angka produksi dan kegiatan perdagangan Nepal terjadi selama beberapa bulan. Sebagai negara miskin-berkembang yang mengandalkan kegiatan produksi untuk menunjang ekonomi nasionalnya, ditambah faktor geografis yang tidak memungkinkan Nepal untuk melakukan kegiatan produksinya, Nepal mengalami depresi ekonomi nasional. Di mana angka PDB, sebagai neraca pengukuran pertumbuhan ekonomi sebuah negara, menurun di Nepal. Kegiatan ekspor yang menurun dan pesatnya kegiatan impor yang tidak diikuti oleh ekspor yang memadai juga akan menyebabkan penurunan stabilitas ekonomi dalam sebuah negara. Penurunan ini dapat dilihat dari grafik berikut:

Grafik 4.2.1: GDP/PDB Pertumbuhan Ekonomi Nepal dalam 10 Tahun⁴

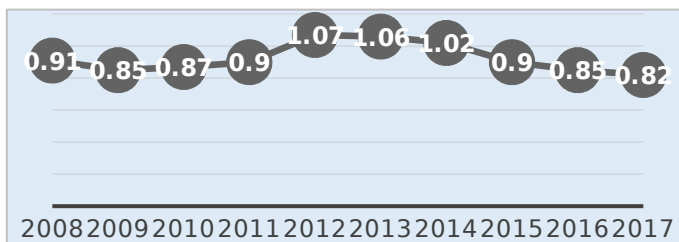
4 Historical Data Graphs per Year. GDP - real growth rate of Nepal <https://www.indexmundi.com/g/g.aspx?v=66&c=np&l=en> Diakses pada 17 November 2018.



Pada data grafik di atas, dapat dilihat bahwa dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, tahun 2012 merupakan titik awal penurunan angka PDB Nepal yang kemudian terus menurun hingga titik terendah pada tahun 2016. Menurun drastisnya PDB Nepal dapat menunjukkan pertumbuhan ekonomi pada tahun itu sangat buruk. Penurunan ini terjadi pasca demokratisasi sistem pemerintahannya dengan konstitusi yang baru pada tahun 2015 ketika sangsi dari India diberlakukan.

Selain angka PDB yang menjadi bukti pendukung menurunnya stabilitas ekonomi Nepal, penulis juga menemukan data jumlah ekspor dan impor Nepal ke negara lain ikut menurun pada tahun 2015 hingga 2016. Hal ini dapat dilihat dari grafik berikut:

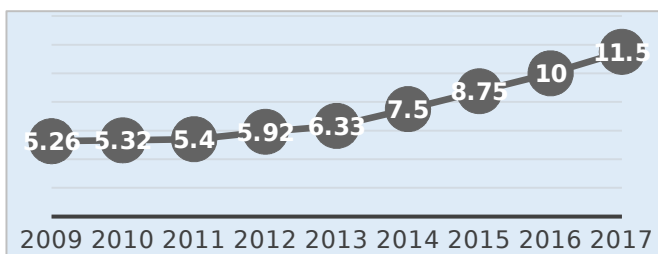
Grafik 4.2.2 : Total Ekspor Nepal per Tahunnya (Billion Dollars)⁵



⁵ Nepal Exports. Historical Data Graphs per Year
<https://www.indexmundi.com/g/g.aspx?v=85&c=np&l=en>
 Diakses pada 17 November 2018.

Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa jumlah ekspor pada tahun 2016 berada di titik paling rendah setelah terjadinya transisi sistem pemerintahan dan konstitusi di Nepal. Hanya berada di sekitar angka US \$ 0,8 milyar dan terus menurun di tahun selanjutnya. Penurunan ekspor ini dikarenakan oleh sedikitnya bahan produksi yang dapat diolah masyarakat Nepal untuk menghasilkan barang-barang produksi untuk dikirim ke luar Nepal. Hal ini juga menunjukkan bahwa demokratisasi secara tidak langsung benar-benar merugikan negaranya sendiri dalam pertumbuhan ekonomi.

Grafik 4.2.3: Total Impor Nepal per Tahunnya⁶

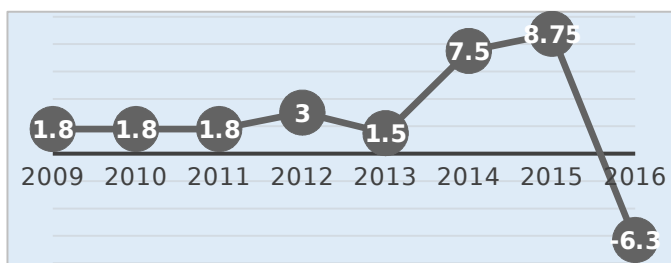


Angka impor Nepal yang cenderung meningkat tiap tahunnya menggambarkan kebutuhan masyarakat dalam sehari-hari maupun produksi juga meningkat, namun sayangnya hal ini tidak diikuti dengan pertumbuhan angka ekspor. Hal ini akan menjadikan Nepal berada dalam kondisi defisit negara yang serius dan terjadinya ekonomi tidak seimbang. Demokratisasi yang diharapkan mampu membangkitkan nilai ekspor Nepal pada kenyataannya mengalami masa yang sangat sulit pada masa transisinya.

⁶ Nepal Imports. Historical Data Graphs per Year
<https://www.indexmundi.com/g/g.aspx?v=89&c=np&l=en>
 Diakses pada 17 November 2018

Selain PDB yang menurun, angka impor yang naik dan tidak diimbangi oleh ekspor yang naik, penurunan stabilitas Nepal juga dapat dilihat dari total hasil produksi dalam kurun waktu tertentu. Hal ini dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 4.2.4: Pertumbuhan Produksi Industri Nepal per Tahunnya⁷



Grafik di atas menunjukkan adanya penurunan drastis dalam produksi industri dalam negeri Nepal pada tahun 2016 pasca berlangsungnya sanksi India terhadap Nepal. Bahkan menyentuh angka -6,3%. Angka defisit ini sangat jauh menurun dibandingkan pada awal tahun 2015 yang menyentuh angka 8,75% yang merupakan pertumbuhan produksi paling signifikan dalam 10 tahun terakhir. Penurunan angka produksi ini tentunya semakin menguatkan bukti menurun drastisnya stabilitas ekonomi Nepal secara tidak langsung sebagai dampak demokratisasi sistem pemerintahan dan pergantian konstitusi Nepal di tahun 2015.

Berbagai bukti penurunan stabilitas ekonomi Nepal di atas menjelaskan bahwa demokrasi tidak selalu menjadi jawaban dalam kesulitan ekonomi yang dihadapi

⁷ Industrial production growth rate. Historical Data Graphs per Year <https://www.indexmundi.com/g/g.aspx?v=78&c=np&l=en> Diakses pada 17 November 2018.

oleh sebuah negara. Melihat pola ekonomi dan dinamika politik Nepal, dapat dikatakan bahwa pembangunan ekonomi sebuah negara tergantung pada beberapa faktor, yakni ukuran populasi negara, situasi global, kerja sama dengan negara lain, serta prioritas ekonomi yang diadopsi oleh negara tersebut. Banyaknya faktor-faktor penentu kesejahteraan masyarakat yang rendah membuktikan demokratisasi Nepal tidak dapat mendongkrak perekonomian yang lebih baik dan bahkan benar-benar berdampak bagi menurun drastisnya perekonomian dalam negerinya.

Kepercayaan diri masyarakat Nepal untuk mengadopsi sistem demokrasi pada sistem pemerintahan dan konstitusinya dengan tujuan mensejahterakan diri melalui kebebasan diri mengatur pemerintahan membuat masyarakat Nepal buta akan prediksi kemunculan implikasi negatif pada berbagai aspek seperti kesiapan diri dan hubungan bilateral negaranya yang kemudian mempengaruhi kondisi perekonomian dalam negerinya.